

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum sebagai implementasi demokrasi telah digunakan hampir sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, yang merupakan negara heterogen. Indonesia telah melakukan pemilihan umum sebanyak 11 kali, pemilu di Indonesia pada awalnya di tujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Secara spesifik dunia internasional memuji pemilu pada tahun 1999 sebagai pemilu pertama di era reformasi yang telah berlangsung secara aman, tertib, jujur, dan, adil dipandang memenuhi standar demokrasi global dengan tingkat partisipasi 92,7%, sehingga Indonesia dinilai telah melakukan lompatan demokrasi. Berdasarkan penelitian yang berjudul *“Discomfiture Of Democracy?The 2005 Election Crisis In Ethiopiaand Its Aftermath”* yang dibuat oleh J. Abbink menjelaskan kondisi yang dialami Indonesia ini sangat berbeda dengan yang dialami oleh Etiopia. Di negara Etiopia terjadi kemunduran demokrasi yang menyebabkan sikap otoriter merajai bangsa Etiopia pada pemilihan umum yang diselenggarakan tahun 2005, selain di Etiopia di negara Amerika juga telah mengalami krisis pemilihan yang terjadi 1986 mengenai jumlah pemilih dan masalah Imigran. Hal ini di jelaskan dalam jurnal internasional yang di buat oleh Wendy K. Tam yang berjudul *Naturalization, Socialization, Participation : Immigrants and (Non)-Voting*. Di Indonesia pada tahun 2002 pemerintah melakukan amandemen keempat UUD 1945 mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dimasukkan sebagai bagian dari pemilu. Peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan pada tahun 2002, mengakibatkan ruang gerak partisipasi politik warga negara menjadi semakin luas. Warga negara memperoleh hak untuk memberikan suaranya dan turut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan dibidang politik dari tingkat daerah sampai tingkat pemerintahan.

Menurut undang-undang nomor 5 tahun 2015 sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan. Berdasarkan pengertian di atas sosialisasi memiliki peranan yang besar terbentuknya partisipasi masyarakat yang baik. Mengacu dari pengertian di atas sosialisasi dapat

dilakukan oleh beberapa pihak diantaranya, panitia pemungutan suara (lembaga KPU), partai politik, dan tokoh masyarakat.

Panitia pemungutan suara (PPS) merupakan panitia penyelenggara pemilihan ditingkat kelurahan. Panitia pemungutan suara merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemilihan mulai dari sosialisasi, penetapan daftar pemilihan tetap, sampai tahap pemilihan. Panitia pemungutan suara (PPS) menjadi tangan Komisi pemilihan umum (KPU) untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai sistem pemilihan umum di Indonesia yang menganut sistem multi parti bukan dwi partai. Panitia pemungutan suara (PPS) juga berkewajiban melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan dan masyarakat umum, hal ini diharapkan mampu menanggulangi terjadinya mooney politik dan mengurangi angka golput pada pemilihan kepala daerah kabupaten wonogiri tahun 2015.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada bagian 5 pasal 20 secara tegas dan jelas menjelaskan tentang tugas dan wewenang panitia pemungutan suara dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan panitia pemungutan suara memiliki peranan yang sangat penting terhadap sosialisasi yang menyebabkan tingkat partisipasi dan dari segi administrasi pemilihan.

Menurut undang-undang nomor 8 tahun 1987 pasal 1 ayat 6 tentang protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau pemerintah. Berdasarkan pengertian di atas tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat disekelilingnya. Tokoh masyarakat atau sering disebut kaum intelektual diharapkan mampu mengarahkan dan memberi sosialisasi atau pengertian mengenai pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Partisipasi politik menurut Gatara (2009:207), sebagai kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu seperti mengikuti kampanye politik, memberikan suara, dan bekerja dalam suatu pemilihan. Partisipasi merupakan hal pokok yang harus dipenuhi agar terciptanya pemilihan umum, dengan terpenuhinya syarat tersebut diharapkan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada tahun 2015 dapat berjalan dengan sukses, sehingga terciptanya pesta demokrasi yang baik. Undang-undang tahun 2015 nomor 8 tentang pemilihan gubernur,

bupati, walikota dengan metode pilkada serentak menimbulkan semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik di daerah.

Pemilihan umum di kabupaten wonogiri sejak tahun 2004 sampai tahun 2014 mengalami penurunan jumlah partisipasi masyarakat yang sangat signifikan. Penurunan partisipasi tersebut diakibatkan beberapa faktor diantaranya, kurangnya sosialisasi pemilu, ketidaksesuaian daftar pemilihan tetap, golput, dan faktor pekerjaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang berjudul “peran panitia pemungutan suara (PPS) dan tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 (studi kasus kelurahan Giriwono kecamatan Wonogiri kabupaten Wonogiri)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pokok-pokok masalah yang akan diteliti dalam penelitian, berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran panitia pemungutan suara (PPS) dan tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 kelurahan Giriwono kecamatan Wonogiri kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimanakah peran panitia pemungutan suara (PPS) dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 kelurahan Giriwono kecamatan Wonogiri kabupaten Wonogiri?
3. Seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 kelurahan Giriwono kecamatan Wonogiri kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan fokus dari penelitian atau hal yang ingin dicapai, berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran panitia pemungutan suara (PPS) dan tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 kelurahan Giriwono kecamatan Wonogiri kabupaten Wonogiri?

2. Untuk mengetahui peran panitia pemungutan suara (PPS) dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 kelurahan Giriwono kecamatan Wonogiri kabupaten Wonogiri?
3. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 kelurahan Giriwono kecamatan Wonogiri kabupaten Wonogiri?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya dan masyarakat luas tentang peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai peranan panitia pemungutan suara (PPS) dan tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pada pemilihan kepala daerah tahun 2015.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan solusi dan wawasan terhadap panitia pemungutan suara, tokoh masyarakat, sosialisasi, partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2015.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai panitia pemungutan suara (PPS) dan tokoh masyarakat, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2015.